Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Februari 2023, 9 (4), 413-427
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7681586
p-ISSN: 2622-8327 e-ISSN: 2089-5364
Accredited by Directorate General of Strengthening for Research and Development
Available online at https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP

Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Motivator Ketahanan Keluarga (Motekar) Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Karawang

Poetry Ardeavany Rahma[1] , Gili Argenti[2], Haura Atthahara[3]

[1] Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang
[2,3]Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang

Received: *4 Januari 2023*
Revised: *7 Januari 2023*
Accepted: *9 Januari 2023*

Abstract

Motekar is a program created by the West Java provincial government in 2014 by following Regional Regulation (Perda) No. 9 of 2014 concerning the Implementation of Family Resilience Development to help empower people who experience family vulnerabilities. This study describes the community empowerment strategy through the Family Resilience Motivator (MOTEKAR) program in Karawang Regency during the COVID-19 pandemic in dealing with family vulnerabilities that occurred in Karawang Regency. This research is qualitative research using descriptive methods and the theory used in this research is the theory of community empowerment strategy by Parsons et.al in (Suharto, 2014) which divides 3 levels or levels of strategy, its the micro-level, mezzo level, and macro level. The micro-level strategy empowers clients individually, the mezzo level strategy empowers using a group as an intervention medium, and the macro-level strategy empowers people who are considered can overcome their problems. The purpose of this study was to determine the extent to which level strategies were fulfilled in the process of implementing empowerment through the Motekar program in Karawang Regency during the COVID-19 pandemic. The results of this study indicate that in the implementation of empowerment there are still 2 strategies that have not been fulfilled.

Keywords: *Empowerment strategy, Motekar, Vulnerability Family*

(*) Corresponding Author: 1610631180155@student.unsika.ac.id

How to Cite: Rahma, P., Argenti, G., & Atthahara, H. (2023). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Motivator Ketahanan Keluarga (Motekar) Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9*(4), 413-427. https://doi.org/10.5281/zenodo.7681586.

PENDAHULUAN

Masa pandemi covid-19 seperti sekarang ini memberikan pengaruh terhadap kehidupan keluarga dan bermasyarkat dalam aspek sosial, ekonomi, psikologi, dan budaya. Covid-19 atau **CoronavirusDisease** 2019 yaitu suatu penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang menyerang sistem pernafasan manusia. Penyakit ini teridentifikasi pertama kali di Kota Wuhan, China pada bulan Desember tahun 2019 dan menyebar ke seluruh dunia sehingga WHO (*World HealthOrganization*) menyatakan bahwa penyakit ini merupakan suatu pademi karena penularannya menyebar hampir ke penjuru dunia. Dengan tingginya tingkat penularan dan resiko kematian, sehingga banyak negara-negara melakukan pembatasan untuk segala aktivitas di negara- negara mereka, termasuk Indonesia. Pada masa awal pandemi banyak kegiatan-kegiatan yang harus ditutup atau diberhentikan untuk sementara agar dapat menghindari persebaran virus karena dengan banyaknya kerumunan menyebabkan persebaran

virus yang meluas. Kegiatan-kegiatan yang ditutup seperti sekolah, pasar, perusahaan, kegiatan keagaamaan,pariwisata dan lain sebagainya yang melibatkan banyak orang. Dari hal tersebut tentunya sangat berdampak terhadap segala aspek yaitu ekonomi, sosial, psokologi,budaya.

Dampak dari covid ini tentu sangat besar bagi masyarakat di Indonesia. Menurut data BPS sekitar 8.76% perusahaan di Indonesia berhenti beroperasi dan 24,31% perusahaan harus mengurangi jumlah pegawainya karena covid(BPS, 2020). Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah yaitu PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dimana pembatasan tersebut meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosia budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan lainnya yang menyebabkan adanya kerumunan masyarakat. Sehingga, karena pembatasan sosial tersebut banyak perusahaan yang mengalami kerugian karena produksi harus terhenti sementara waktu, dan penjualan produk juga berkurang karena berkurangnya daya beli masyarakat. Di Jawa Barat tercatat sebanyak 62.848 ribu pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) karena dampak dari covid(Setiawan, 2020). Menurut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat tercatat sebanyak 80.151 ribu pekerja dari 987 perusahaan dirumahkan dan 19.384 ribu pekerja dari 474 perusahaan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja di Kabupaten Karawang (Sarasa, 2021). Dilihat dari data berikut, dampak covid bagi masyarakat Indonesia khususnya Kabupaten Karawang sangat besar, padahal Kabupaten Karawang merupakan daerah dengan wilayah industri terbesar di Indonesia. Banyak orang yang harus kehilangan pekerjaan dan sumber penghasilan karena covid. Banyak masyarakat yang takut untuk beraktivitas di luar rumah karena persebaran virus covid, sehingga berdampak pada segala aspek.

Dari berbagai permasalah tersebut tentu menimbulkan masalah baru dimana masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat sebagian besar disebabkan oleh faktor ekonomi yang melahirkan kerentanan keluarga

Kerentanan keluarga berkaitan dengan kurang optimalnya pelaksanaan fungsi- fungsi keluarga, sehingga melahirkan keluarga yang bermasalah seperti keluarga prasejahtera dimana keadaan suatu keluarga yang tidak dapat memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator penentu yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan penghasilan. Keluarga rentan juga dapat didefinisikan sebagia keluarga yang kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/ atau non fisik. Kecenderungan suatu keluarga yang tidak memiliki ketahanan keluarga akibat adannya kerentanan dalam suatu keluarga dapat mengakibatkan munculnya permasalahan sosial seperti : perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kesalahan dalam mengasuh anak, kenakalan anak dan remaja, perdagangan anak dan perempuan, perdagangan manusia (human trafficking), penyalahgunaan penggunaan obat dan narkotika, dan berbagai macam masalah sosial yang diakibatkan oleh kerentanan keluarga. Kerentanan keluarga tersebut dapat muncul akibat adanya permasalahan internal dalam suatu keluarga dalam menghadapi berbagai permasalahan dari luar baik dari aspek sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan.

Kabupaten Karawang merupakan salah satu daerah dengan tingkat kerentanan keluarga cukup tinggi. Hal itu disebabkan karena banyaknya

permasalahan sosial yang menyebabkan munculya kerentanan keluarga yang ada di Kabupaten Karawang. Berbagai macam permasalahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan. Seperti dalam kasus kekerasan dalam keluarga menurut hasil penelitian menjelaskan bahwa kekerasan yang terjadi di masyarakat sebagian besar terjadi di lingkungan masyarakat yang bertaraf ekonomi menengah ke bawah yang sebagian korbannya yaitu wanita dan anak-anak dibawah usia 18 tahun(Raijaya & Sudibia, 2017). Dengan keadaan ekonomi menengah kebawah menyebabkan ketidakberdayaan masyarakat dalam menghadapi permasalah yang terjadi disekitarnya.

Pada tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Karawang mencapai 2.439.085 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 1.236.052 dan jumlah penduduk perempuan 1.203.033 jiwa. Dari aspek ketanagakerjaan, penduduk yang berumur diatas 15 tahun berjumlah 1.791.528 orang, yang terdiri dari 1.162.633 orang yang merupakan angkatan kerja dan 628.895 orang tidak termasuk angkatan kerja dan diakumulasikan presentase jumlah pengangguran yang ada di Kabupaten Karawang pada tahun 2020 yaitu 11.52%.

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (berusia 15 tahun keatas) yang bekerja, memiliki pekerjaan namun untuk sementara waktu tidak bekerja, dan pengangguran. Dari data yang ditunjukkan diatas dapat dilihat bahwa jumlah pengangguran yang ada di Kabuapaten Karawang masih cukup tinggi dan cenderung meningkat dari tahun sebelumnya, dan di tahun 2020 semakin bertambah seiring dengan dampak covid 19.

Terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten Karawang di tahun 2020, sehingga awal dari permasalahan kerentanan keluarga muncul disini, yaitu kurang terpenuhinya kebutuhan keluarga karena tidak adanya sumber penghasilan untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari keluarga. Sehingga dalam kondisi tersebut membuat keluarga mengalami sebuah keadaan yang serba kekurangan, seperti kurangnya mendapat fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, pangan, perumahan dan sebagainya yang selayaknya dimiliki oleh sebuah keluarga yang ideal sehiggamunculah masalah-masalah yang terjadi dalam suatu keluarga yang mengakibatkan adanya kerentanan keluarga. Bentuk-bentuk permasalahan sosial yang terjadi di suatu keluarga seperti : perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kesalahan dalam mengasuh anak, kenakalana anak dan remaja, perdagangan anak dan perempuan, perdagangan manusia (human trafficking) penyalahgunaan penggunaan obat dan narkotika, dan berbagai macam masalah sosial yang diakibatkan oleh kerentanan keluarga.

Dari jumlah kasus kerentanan keluarga yang terjadi di Kabupaten Karawang tersebut tentunya dibutuhkan suatu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, karena seperti yang tertulis dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pada pasal 14 tentang perlindungan sosial, bahwa pemerintah memberikan perlindungan sosial dengan maksud untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial yang dimaksud adalah berupa bantuan sosial, advokasi sosial, dan/atau bantuan hukum. Dimana bantuan sosial yang diberikan berupa bantuan langsung, penyediaan aksebilitas, dan/atau

penguatan kelembagaan. Diharapkan agar seseorang, keluarga atau kelompok yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup dengan wajar. Sedangkan bantuan berupa advokasi sosial dan bantuan hukum yaitu penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak diharapkan dapat melindungi, membela seseorang, keluarga dan/atau kelopok yang dilanggar haknya oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Sehingga melihat kondisi tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dan membentuk Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR) dalam mengoptimalkan pembangunan ketahanan keluarga yang berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/ Kota, Instansi Terkait, Masyarakat, dan dunia usaha. Motivator Ketahanan Keluarga atau (MOTEKAR) merupakan tenaga motivator keluarga yang berasal dari masyarakat yang berasal dari desa atau daerah setempat yang memiliki kemampuan, kemauan, pengetahuan, dan keterampilan dalam melakukan tugas pemberdayaan keluarga atau masyarakat melalui sinergitas beberapa program terkait yang tersedia di lingkup daerah setempat untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga atau masyarakat yang membutuhkan (BP3AKB, 2014). MOTEKAR berasal dari bahasa sunda yang berarti " mau berusaha untuk mengubah nasibnya". Diharapkan dari dibentuknya program tersebut dapat memberikan dorongan dan motivasi terhadap keluarga dan masyarakat yang memiliki kerentanan fisik, ekonomi, psiko-sosial dapat merubah keadaannya dengan memiliki kemauan dan usaha untuk mengembangkan potensi diri sebagai manusia dalam satu kesatuan sehingga dapat menjadi keluarga yang berkualitas. Dalam proses pemberdayaan keluarga ini dibutuhkan fasilitasi yang berbentuk motivasi dan stimulus peran dari para Motekar yang telah memiliki keberdayaan diri dan dapat mentransformasikan nilai kebudayaan agar niat dan kemauan yang dibutuhkan untuk pengembangan diri dapat terwujud dalam suatu aktivitas sebagai solusi dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di suatu keluarga atau masyarakat. Dalam perencanaan program jangka panjang yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Motekar dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan terciptanya keluarga yang bekualitas dari segi :

1. Strukturisasi dan legalitas keluarga
2. Ketahanan fisik keluarga
3. Ketahanan ekonomi keluarga
4. Ketahanan sosial psikologi keluarga.

Semenjak 2014 motekar telah hadir dan membantu memberdayakan keluarga rentan yang ada di Kabupaten Karawang. Dengan berbagai pelatihan dan pengalaman yang dimiliki oleh kader-kader Motekar, permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di keluarga atau masyarakat sedikit bisa membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun tentu saja masih terdapat kendala-kendala yang terdapat dalam pelaksanaan program-program motekar. Berdasarkan penelitian dengan dalah satu koordinator Motekar Kabupaten Karawang menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan program ini masih ada sedikit kendala yang dihadapi yaitu : pertama, masih terdapat masyarakat yang belum memahami betul tentang peran masyarakat dalam pemberdayaan keluarga, serta masih

terbatasnya stakeholders seperti organisasi profesi dan dunia usaha, penyandang dana pembangunan yang dibutuhkan dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Karawang. Motekak Kabupaten Karawang beumBekerjasama dengan berbagai kelompok organisasi untuk mengembangka potensinya dalam membantu masyarakat. Sehingga penerapan porgrammotekar masih belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Ditambah dalam situasi pandemi covid-19 segala bentuk kegiatan menjadi terbatas. Karena sasaran program ini yaitu masyarakat yang mengalami kerentanan dalam keluarganya, dimana sebagian besar masyarakat tersebut berasal dari kelas ekonomi menengah kebawah sehingga sebagian besar masyarakatnya kurang mendapatkan edukasi dan pendidikan yang mumpuni.

Kedua, Jumlah Motekar yang masih terbatas yang tersebar di Kabupaten Karawang.Terhitung sampai tahun 2020 jumlah kader Motekar yang terdapat di Kabupaten Karawang berjumlah 45 orang yang tersebar di 14 kecamatan, dan 19 desa dan 1 kelurahan, dimana tiap-tiap desa hanya terapat 1 sampai 3 kader Motekar, sehingga dirasa masih belum bisa menjangkau seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Karawang yang terdiri dari 30 kecamatan, 12 kelurahan, dan 297 desa.

Ketiga, Begitu pula dengan tenaga-tenaga ahli yang dibutuhkan dalam penyelesaian permasalahan seperti dibidang advokasi dan psikologis yang bersifat tidak terikat sehingga dirasa masih kurang optimal pelaksanaannya. Karena bersifat tidak mengikat, sehingga dalam pemenuhan tugasnya, pihak terkait dirasa kurang optimal dan kurang diproritaskan.

Salah satu tugas pokok pemerintah yaitu memberdayakan masyarakatnya, karena pemerintah memiliki tanggung jawab dalam mensejahterakan masyarakatnya serta memiliki peran untuk merangsang, mendorong, dan memotivasi setiap individu agar memiliki kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya, sehingga diperlukan suatu strategi pemberdayaan yang diperlukan pemerintah untuk bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat dan memberdayakan kembali masyarakat yang ada di daerahnya, ditambah dengan kondisi saat ini ditengah pandemi covid-19 yang membuat segala keadaan menjadi terbatas dan membuat masyarakat mengalami banyak kesulitan terutama dalam segi ekonomi yang menambah banyak masaalah yang terjadi dalam keluarganya. Dalam menganalisis permasalahan ini peneliti menggunakan teori strategi pemberdayaan menurut Parsons et.al dalam (Suharto, 2014) yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif atau berkelompok, namun dalam beberapa situasi strategi pemberdayaa dapat dilakukan secara individual meskipun pada akhirnya berkaitan dengan kolektifitas.

TINJAUAN PUSTAKA

Strategi

Menurut Parsonset.al dalam Edi Suharto (Suharto, 2014) menyatakan bahwadalam proses pemberdayaan, dibutuhkan suatu strategi karena dalam pemberdayaan dilakukan secara individu maupun secara kolektif sehingga dibutuhkan suatu strategi aarapelaksanannyadapat berjalan dengan baik. Dalam teori ini terdapat tiga dimensi strategi yaitu

1. Aras Mikro

Dalam dimensi ini pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individual. Proses pemberdayaan tersebut berupa bimbingan, konseling, stressmanagement, crisissintervention. Tujuan dari dilakukannyapemberdayaan dari strategi ini yaitu agar dapat membimbing dan melatih klien dalam menjalankan kehidupanya dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Strategi ini sering disebut sebagai pedekatan yang berpusat pada tugas (t*askcenteredapproach*)

2. Aras Mezzo

   Dalam dimensi ini pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok kliendimana sekelompok klien ini digunakan sebagai media intervensi agar dapat memotivasi sehingga dapat meningkatkan keberfungsian sosial terhadap sekelompok individu ynag terkumpul dan dapat berpera baik sesuai tugas dan fungsinya. Dalam strategi ini upaya yang dilakukan berupa pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok yang digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap agar klien dapat memutuskan tindakan apa yang harus dilakuan untuk memecahkan masalahnya.

3. Aras Makro

   Dalam dimesi ini memandang klien sebagai pihak yang memiliki potensi yang dapat memahami kondisi yang dihadapinya dan dapat mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Strategi ini juga biasa disebut Strategi Sistem Besar *(Large System Strategy)* karena sasaran dalam strategi ini mengarah pada sistem lingkungan yag luas. Upaya yang dilakukan dalam strategi ini yaitu berupa perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, pengorganisasian masyarakat,manajemen konflik,dan lobbying.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan atau *empowerment* berasal bahasa Inggris dari kata power yang berarti kekuasaan, maka dari itu suatu pemberdayaan selalu berkaitan dengan konsep kekuasaan dimana yang berkuasa memberian pengaruh terhadap yang tidak memiki kuasa. Pembedayaan masyarakat menurut Alinsky yaitu pemberdayaan masyarakat merupakan suatu hal yang positif dimana pemberdayaan masyarakat didefinisikan sebagai suatu usaha dari individu atau kelompok yang berusaha agar dapat berkembang, mendapatkan pembebasan hak, pertumbuhan ekonomi, sumber daya, suatu perubahan, dan penyelesaian masalah (Varlota, Jinia, & Asaduzzaman, 2020). Pemberdayaan merupakan suatu proses perubahan oleh individu atau kelompok dengan sedikit atau tanpa kekuatan, mendapatan kemampuan dan sumber daya untuk membuat pilihan yang mempengaruhi hidup mereka. Menurut Edi Suharto pemberdayaan merupakan suatu proses membantu individu, keluarga, dan kelompok masyarakat dalam meningkatkan kekuatan personal, inerpersonal, sosio-ekonomi, dan politik serta mengembangkan pengaruh terhadap perbaikan lingkungan mereka.(Suharto, 2014).

Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR)

Motekar berasal dari bahasa sunda yang berarti “mau berusaha mengubah nasibnya”. Pemilihan kata Motekar dipilih dalam pelaksanaan program ini karena kata tersebut dinilai dapat memberikan dorongan agar dapat merubah nasib diri

dan keluarga yang memiliki kerentanan fisik, ekonomi, psiko-sosoial, dan sosial budaya sehigga dapat berdaya kembal memalui adanya kemauan dengan melakukan berbagai usaha untu mengembangkan potensi yang dimiliki agar dapat menjadi keluarga yang berkualitas. Ketahanan keluarga menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 yaitu suatu kondisi suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan materil dan psikis dan keluarganya untuk hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya. Untuk hidup harmoni dalam meningatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Dalam perspekif Mc Cubbin et.al dalam (Puspitawati, Herawati, & Rahma, 2016) ketahanan keluarga merupakan suatu konsep holistik yang merangkai alur pemikiran suatu sistem, mulai dari kualitas ketahanan, sumber daya, strategi coping dan apprasial sebagai strategi dalam menangani dan melakukan penilaian terhadap suatu proses yang bersifat dinamis dalam keluarga untuk mengatasi permasalahannya, baik yang berasal dari internal keluarga maupun eksternal. Berdasarkan definisi ketahanan keluarga tersebut, menunjukkan betapa pentingnya keberdayaan faktor internal keluarga sebagai sistem yang menjadikan suatu kekuatan dalam menghadapi berbagai kendala yang berasal dari internal maupun eksternal keluarga yang bersifat dinamis, sehingga keluarga tersebut mampu bertahan dan berkembang menjadi keluarga ang tangguh dan berkualitas. Maka dibentuklah suatu program yang dapat membantu masyarakat untuk berdaya dan bangkit kembali menjadi keluarga yang berkualitas yaitu program Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR).

METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan hasil penelitian ini peneliti tidak hanya tefokus pada pengumpulan data dan pengkalsifikasian data, tetapi juga menganalisis tentang data tersebut. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalsis permasalahan yang berkaitan dengan "Pemenuhan Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Motivator Ketahanan Keluarga (Motekar) di Kabupaten Karawang".

Teknik pengumpulan data adalah suatu langkah yang dinilai strategis dalam suatu penelitian, karena mempunyai tujuan yang utama dalam memperoleh data. Tanpa adanya pengumpulan data penelitian ini tidak akan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Pengumpulan data dimaksudkan untuk mencari data tentang penelitian ini dan menggali makna data tersebut dan mengaitkannya dengan penelitian yang dilakukan. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti meliputi observasi, wawancara, dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2017) yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data yaitu, data *reduction*, data *display*, dan *conclusion/*verification

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Parsons et.al dalam (Suharto, 2014) menyatakan bahwa dalam proses pelaksanaan pemberdayaan kepada masyarakat dibutuhkan suatu strategi karena dalam pelaksanaanya dilakukan baik secara individual maupun kolektif

atau berkelompok sehingga dibutuhkan suatu strategi agar pelaksanaannya tepat sasaran serta dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Parsons et.al membagi 3 dimensi strategi pemberdayaan yaitu Aras Mikro, Aras Mezzo, dan Aras Makro. Adapun hasil analisis mengenai strategi pemberdayaan masyarakat melalui program motivator ketahanan keluarga (MOTEKAR) dalam masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Karawang.

Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program MOTEKAR di Kabupaten Karawang Dilihat Dari Dimensi Aras Mikro

Motekar telah berhasil menerapkan strategi aras mikro dimana dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan dilakukan secara individual dengan cara menjadi mediator anaara warga yang terlibat suatu permasalahan, memberikan edukasi tentang pembinaan keluarga di usia muda serta informasi tentang program keluarga berencana kepada pasangan yang masih belia. Karena salah satu sasaran program dari motekar ini yaitu meningkatan peran keluarga dalam pembinaan keluarga dan jenis kegiatan yang dilakukan oleh motekar yaitu pendampingan, sosialisasi ketahanan keluarga, dan monitoring (Atthahara & Priyanti, 2019). Kader motekar melakukan bimbingan dan konseling dalam membantu klien dalam menyelesaikan permalasahannya serta membimbing dan melatih klien dalam menjalankan kehidupannya bahkan dimasa pandemi covid-19 saat ini. DP3A bersama kepanjangan tangan yaitu P2TP2A dan Motekar terus berupaya membantu masyarakat dalam menghadapi permasalahan kerentanan keluarga dengan memberkan fasilitasi berupa mediator, bimbingan konseling, serta penyelesaian masalah lainnya sehingga masyarakat dapat berdaya kembali.

Program kegiatan motekar dilaksanakan untuk membantu masyarakat yang mengalami berbagai kendala seperti kesulitan akses untuk membuat surat-surat penting seperti kartu keluarga, akta kelahiran, surat nikah, surat cerai, bahkan surat kematian. Sesuai dengan salah satu capain dari dibentuknya motekar yaitu untuk meningkatkan sturkturisasi dan legalitas keluarga, DP3A bersama kepanjangan tangan yaitu motekar terus berupaya unutk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan berkas-berkas seperti KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Buku Nikah, dsb. Selanjutnya banyak juga masyarakat yang mengalami permasalahan dalam keluarganya seperti terjadinya tindak kekerasan dalam keluarga yang menimpa istri atau anak, pelecehan seksual, kenakalan remaja, perdagangan manusia, dan lain sebagainya.

Kasus yang penulis temui di lapangan yaitu terjadinya tindak pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dimana terdapat 4 korban perempuan yang masih anak-anak. Anak-anak tersebut dilecehkan oleh seorang pemuda yang tinggal di desa yang sama dengan mereka dengan memberikan iming-iming berupa uang jajan atau jajanan kepada anak-anak tersebut untuk menlancarkan aksinya. Kejadian tersebut terungkap setelah salah satu anak mengadu kepada ibunya bahwa dia merasakan sakit di area vital dan tidak bisa buang air kecil. Setelah ditelusuri ternyata korban lebih dari satu. Pelaku pelecehan seksual tersebut kabur dari desa setelah mengetahui perbuatannya telah terungkap. Orang tua korban bersama korban datang langsung ke DP3A untuk meminta bantuan advokasi dan psikologis yang ditemani oleh kader motekar. Psikolog yang ada di DP3A langsung melakukan sesi konseling dengan para korban agar korban tidak merasa trauma dan takut atas kejadian yang menimpanya dan juga motekar

mendamping orang tua korban untuk memproses secara hukum pelaku pelecehan seksual tersebut.

Kasus lain peneliti temui di Desa Mekarjati yaitu kasus pelecehan yang dialami seorang gadis muda. Pihak dari keluarga perempuan tidak terima atas tindakan pelecehan yang dilakukan oleh kekasih dari gadis muda tersebut. Pihak keluarga ingin menuntut pihak dari laki-laki sedangkan pihak dari laki-laki ingin menyelesaikan secara kekeluargaan. Karena pihak dari laki-laki berasal dari desa yang berbeda sehingga pihak motekar diminta unutk menjadi penengah untuk menyelesaikan konflik warga antar desa tersebut. Akhirnya setelah mempertemukan dua keluarga tersebut dicapailah kesepakatan bahwa pihak laki-laki harus membayar denda berupa sejumlah uang kepada pihak perempuan.

Dari berbagai macam permasalahan tersebut kader motekar melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai mediator. Dalam penyelesaian permasalahan ini kader motekar melakukan strategi aras mikro dimana proses pemberdayaan dilaksanakan secara individual. Seperti dalam hal membantu masyarakat membuat surat legalitas, kader motekar dapat membantu melayani warga secara langsung. Salah satu kader motekar Desa Mekarjati yang saya wawancarai menjelaskan bahwa dirinya merupakan salah satu aparat desa non pns yang bekerja di kantor desa, warga Desa Mekarjati biasanya menemui beliau untuk mengurus surat-surat penting.

Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program MOTEKAR di Kabupaten Karawang Dilihat Dari Dimensi Aras Mezzo

Dalam pelaksanaan kegiatan, motekar berkoordinasi dengan BKKBN dalam melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pembinaan keluarga berencana bagi masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Ibu Dewi selaku kader motekar sekaligus anggota posyandu Desa Mekarjati. Kegatan tersebut dilakukan untuk mencapai salah satu tujuan dari pemberdayaan masyarakat yaitu Perbaikan kelembagaan dimana setiap anggota yang terlibat dapat merasa berdaya dan berperan untuk memajukan program lembaga sehingga tujuan dari lembaga dapat tercapai. Namun tentu pelaksanaan kegiatan motekar perlu suatu terobosan baru sehingga program tersebut dapat lebih menarik minat masyarakat untuk turut berpartisipasi. Sejak motekar berdiri di Karawang hingga saat ini teracatat belum ada organisasi yang bekerja sama atau dari pihak DP3A memita suatu kelompok untuk berkolaborasi melakukan kegiatan bersama unutk memberdayakan masyarakat.

Untuk bantuan tenaga psikolog, motekar dan P2TP2A bekerja sama secara sukarela dengan beberapa psikolog sehingga bersifat tidak terikat. Tenaga psikolog yang terdapat di P2TP2A sebanyak tiga orang yang terdiri dari satu ASN DP3A yang berlatar pendidikan psikologi, satu orang dosen dari Unsika, dan satu orang lagi dari UBP. Ketiga psikologi ini merupakan relawan yang membantu para korban yang membutuhkan pendampingan psikologi, karena berifat tidak terkat dan sukarela jadi saat peran psikologi dibutuhkan maka pihak motekar menghubungi para psikologi ini dan menanyakan kesediaan waktu apabila mereka bersedia hadir maka mereka bisa langsung datang ke P2TP2A atau ke lokasi dimana korban itu berada.

Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak beserta P2TP2A dan motekar saling berhubungan satu sama lain karena motekar dan P2TP2A

merupakan kepanjangan tangan dari DP3A. Motekar yang menjadi garda terdekat dengan masyarakat sehingga kader-kader motekar dituntu untuk selalu siaga apabila terjadi suatu kasus di tengah-tengah masyarakat, apabila suatu kasus tersebut masih belum bisa tertangani maka kasus tersebut dilanjutkan ke satgas P2TP2A untuk ditindak lanjuti, dan segala keputusan yang diambil disetujui oleh DP3A.

Sehingga dari penjelasan diatas bisa dilihat bahwa koordinasi antara motekar dengan organisasi atau lembaga lain masih satu ruang lingkup dengan motekar yaitu P2TP2A dan DP3A. motekar belum menjalin kerjasama dengan organisasi atau lembaga luar lainnya untuk bekerjasama dalam memberdayakan masyarakat melalui program-program seperti penyuluhan, edukasi, sosialisasi, serta keterampilan untuk mengembangkan potensi masyarakat. Kegiatan yang dilakukan oleh motekar pun belum beragam. Jenis keiata yang dilakukan masih seperti pertemuan antar kader motekar, pendampingan, sosialisasi ketahanan keluarga, monitoring, dan evaluasi (Atthahara & Priyanti, 2019) sehigga banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang motekar dan partisipasi dari masyarakat masih kecil. Tentu dengan terjadinya pademi covid-19 ini juga mempengaruhi semua faktor, termasuk kegiatan-kegiatan motekar yang harus terhambat dengan adanya pandemi ini. Sehingga dalam dimensi ini motekar belum memenuhi strategi aras mezzo dimana melaksanakan kegiatannya bersama suatu kelompok atau organisasi sebagai media intervensi bagi masyarakat untuk dapat memotivasi dan memberdayakan kemabali sehingga dapat meningkatkan keberfungsian sosial dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat

Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program MOTEKAR di Kabupaten Karawang Dilihat Dari Dimensi Aras Makro

Dalam pelaksanaan motekar di kabupaten karawang ini hampir sebagian besar masyarakat yang telah dibantu oleh motekar cenderung bersikap pasif dalam berkontribusi atau bahkan membantu masyarakat lain yang mengalami hal yang sama dengannya. Salah satu faktor yang mengakibatkan kepasifan masyarajat ini yaitu pertama tidak mau terlibat dengan permasalahan orang lain, kedua takut orang tersebut tidak terima, ketiga merasa cukup dengan bantuan yang telah diterima dan kembali menjalankan hidup. Dalam pelaksanaan program motekar di desa – desa, masyarakat desa tersebut aktif dalam berpartisipasi dalam kegiatan tersebut terutama ibu-ibu di desa terebut. Mereka antusias dalam mengikuti kegiatannya namun dalam implentasi ke kehidupannya masih kurang apalagi menyebarluaskan ilmu atau informasi yang mereka dapatkan dari kegiatan ke orang- orang di sekitarnya.

Peran serta masyarakat dalam membantu motekar dalam menyebarluaskan informasi, berbagi pengalaman kepada masyarakat lain sangat diperlukan mengingat bahwa jumlah motekar sangat terbatas dan tidak semua desa terdapat kader motekar. Dalam satu desa hanya terdiri satu sampai dua kader motekar. Hal tersebut tentu dinilai belum bisa menjankau masyaralat satu desa secara keseluruhan, sehingga peran serta masyarakat sangat dibutuhkan. Untuk kegiatan seperti kampanye, aksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat hasil pemberdayaan dari motekar di desanya belum ada. Hal tersebut salah satu faktornya karena kurang beragamnya kegiatan yang dilakukan motekar sehingga masyarakat belum terdorong untuk melakukan suatu aksi agar dapat membantu memberdayakan

masyarakat lain disekitarnya dan pihak-pihak yang telah dibantu oleh motekar cenderung pasif dan sibuk dengan aktifitas pribadi yang dilakukannya . Sehingga dalam dimensi strategi aras makro ini motekar belum memenuhi strategi pemberdayaan ini karena masyarakat cenderung pasif setelah mendapatkan bantuan pemberdayaan dari motekar.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang strategi pemberdayaan masyarakat melalui program motivator ketahanan keluarga (motekar) dalam masa pandemi covid-19 di Kabupaten Karawang. Dalam menganalisis penelitian ini peneliti menggunakan teori strategi pemberdayaan masyarakat oleh Parsons et.al dalam (Suharto, 2014) yang membagi tiga dimensi strategi yaitu : (1) Aras Mikro, (2) Aras Mezzo, dan (3) Aras Makro. Berikut adalah hasil kesimpulan dari hasil penelitian :

1. Pemenuhan strategi aras mikro

   Dalam pelaksanaan kegiatan motekar di Kabupaten Karawang, jumlah tenaga motekar yang ada belum mencangkup keseluruhan wilayah yang ada di Kabupaten Karawang. Jumlah kader motekar yang ada di Kabupaten karawang berjumlah 45 orang yang tersebar ke 14 kecamatan, 19 desa, dan 1 kelurahan, sedangkan jmlah keseluruhan wilayah di Kabupaten Karawang yaitu 30 kecamatan, 297 desa, dan 12 kelurahan. Jumalh tersebut tentunya belum mencukupi untuk menjangkau keseluruhan wilayah. Namun meski dalam keterbatasan SDM, kader motekar tetap melaksanakan tugasnya dalam membantu masyarakat yang mengalami kerentanan keluarga. Kader motekar di Kabupaten Karawang melakukan tugasnya sebagai fasilitator yang melayani masyarakat dalam hal pembuatan berkas lagalitas keluarga, menjadi mediator di masyarakat yang mengalami suatu permasalahan, memberikan pendampingan serta perlindungan terhadap korban kerentanan keluarga seperti kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak. Meskipun dalam situasi pandemi covid-19 saat ini, kader motekar tetap melaksanakan tugasnya dengan melaksanakan protokol kesehatan yang ketat sehingga tugas dan fungsinya tetap berjalan dan tetap aman bagi semua pihak. Sehingga dalam dimensi ini motekar telah memenuhi strategi pemberdayaan aras mikro.

2. Pemenuhan strategi aras mezzo

   Dalam dimensi strategi ini, motekar belum bisa memenuhi strategi ini, karena dalam pelaksanaan kegiatannya motekar baru bekerjasama dengan lembaga-lembga yang masih ada keterkaitan dengan motekar yaotu P2TP2A karena motekar dan P2TP2A merupakan kepanjangan tangan dari DP3A Kabupaten Karawang. program-program kegiatannya pun masih mengikuti program dari DP3A seperti P2WKSS, posyandu, Sekoper Cinta. Jadi belum ada kegiatan yang murni dilakukan oleh motekar untuk memberdayakan masyarakat. Motekar belum bekerjasama dengan suatu organisasi penggiat, organisasi keterampilan sehingga dalam pelaksanaan program-programnya masih belum beragam. Kegiatan-kegiatan seperti penyuluhan, edukasi, pendiidkan keterampilan baru akan direncanakan pada tahun 2020 namun dengan terjadinyai pandemi covid-19 ini membuatn rencana tersebut harus

tertunda. Dalam situasi pendemi saat ini, kegiatan-kegiatan yanng belibatkan banyak orang dan membuat kerumunan dilarang untuk dilakukan guna menghindari persebaran virus corona. sehingga kegiatan motekar yang melibtkan suatu kelompok sebagai media intervensi bagi masyarakat dalam melaksanakan proses pemberdayaan belum terlaksana.

3. Pemenuhan strategi aras Makro

   Dalam melaksanakan program kegiatan motekar, ouput yang diharapakan yaitu keluarga binaan atua masyarakat yang telah berdaya kembali dapat meningkatkan taraf hidupnya, dan dapat melanjutkan kembali hidupnya dengan lebih baik. tentu hasil akhr dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh motekar sangat diharapkan dapat tercapai secara kseluruhan. Namun tentu perlu persebaran informasi mengenai adanya motekar itu sangat diperlukan agar manfaat dari adanya motekar ini dapat dirasakan oleh setiap masyarakat. Peran aktif para klien atau masyarakat yang telah dibina oleh motekar tentu sangat dipelukan. Mereka dapat menginformasikan kepada orang-orang di sekitarnya apabila sedang menghadapi sutatu permasalahan yang serupa, atau mereka juga bisa memberikan "pertolongan pertama" kepada korban seperti halnya yang dilakukan motekar saat menbantu klien menghadapi suatu permasalahan. Dengan adannya pernginformasian dari klien, dapat membantu masyarakat yang masih ragu untuk meminta bantuan kepada motekar karena klien sendiri yang telah meraskan dampaknya dan dapat menjadi review bagi masyarakat lain apabila sedang mengalami kerentanan keluarga dan tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa. Akan tetapi sebagian besar klien cenderung bersikap pasif setelah selesai mendapatkan pemberdayaan, pendampingan, serta permasalahannya telah terselesaikan berkat bantuan dari motekar. Para klien ini sebagian besar merasa ragu untuk menyarankan apalagi membantu masyarakat lain yang sedang mengalami kerentanan keluarga untuk meminta bantuan atau melapor ke kader motekar atau bahkan ke ketua rt setempat. Salah satu alasan terbedarnya yaitu masyarakat tersebut takut terlibat dalam permasalahan orang lain, padahal masyarakat yang sedang mengalami salah satu masalah kerentanan keluarga tersebut sedang mengahrapkan suatu bantuan namun tidak tahu harus kemana. Sehingga dalam pelaksanaan program motekar ini masih belum memenuhi strategi pemberdayaan aras makro karena belum adanya peran serta klien dalam mengatasi suatu permasalahan yang terjadi disekitarnya dan belum adanya suatu gerakan yang dibuat oleh satu atau sekelompok klien seperti aksi sosial, kampanye, dan lain sebagainya untuk mengatasi suatu permasalahan kerentanan keluarga dalam ruang lingkup terkecil yaitu lingkungan masyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Adimihardja, K., & Hikmat, H. (2001). PRA (Participatory Research Apprasial) dalam Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat. Bandung: Humaniora Utama Press.

Arikunto, S. (2016). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta

Atthahara, H., & Priyanti, E. (2019). PEREMPUAN KEPALA DAERAH : ANALISIS KINERJA BUPATI CELICA NURRACHADIANA DALAM

PROGRAM KEPENTINGAN PRAKTIS GENDER DI KABUPATEN KARAWANG. Jurnal Politikom Indonesiana , 83

BP3AKB. (2014). Pedoman Umum Program Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR) Di Jawa Barat. Dalam F. Saleh, A. Rukmini, & Chairiawaty, Pedoman Umum Program Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR) Di Jawa Barat (hal. 13-15). Bandung: Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Barat.

BPS . (2019). Statistik Kesejahteraan Rayat Kabupaten Karawang 2019. Dalam B. P. Karawang, Statistik Kesejahteraan Rayat Kabupaten Karawang 2019 (hal. 23). Kabupaten Karawang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang.

BPS. (2020). Operasional Perusahaan Ditengah Pandemi. Dalam S. Ayuni, I. Budiati, & H. A. Reagan, Analisis Hasil Survei Dampak Covid-19 Terhadap Pelaku Usaha (hal. 3). Jakarta: BPS RI.

BPS. (2018). Kabupaten Karawang Dalam Angka. Karawang: Badan Pusat Statistika Kabupaten Karawang.

BPS. (2020, juli 15). Badan Pusat Statistik. Dipetik september 1, 2020, dari website Badan Pusat Statistik Indonesia: https://www.bps.go.id/pressrealease/2020/07/15/1744/presentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.htm

DPRRI, S. J. (2016). undang-undang dasar 1945. Dipetik juli senin, 2020, dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: www.dpr.go.id/jdih/uu1945

Fitriani, N. I. (2020). TIINJAUAN PUSTAKA COVID-19: VIROLOGI, PATOGENESIS, DAN MANIFESTASI KLINIS. Jurnal Medika Malahayati , 4 (3).

Haboddin, M. (2015). Pengantar Ilmu Pemerintahan. Dalam M. Haboddin, Pengantar Ilmu Pemerintahan (hal. 4-10). malang : Tim UB Press.

Hadyadiningrat, S. (2001). Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta: Haji Mas Agung.

Hasanah, V. R., & Komariah, D. N. (2019). MOTEKAR (Motivator Ketahanan Keluarga) dan Pemberdayaan Keluarga Rentan. PAUD Lectura: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini , 42.

Heene, A. (2010). Manajemen Strategi Keorganisasian Publik. Dalam A. Heene, Manajemen Strategi Keorganisasian Publik. Bandung: PT Refika Aditama.

Huraerah, A. (2008). Pengorganisaian dan Pengembangan Masyarakat. Dalam A. Huraerah, Model dan Straegi Pembangunan Berbasis Kerakyatan (hal. 24). Bandung: Humaniora.

Ife, J. (1996). Pembangunan Masyrakat : Anaisis dan Praktik. Dalam J. Ife, Pembangunan Masyrakat : Anaisis dan Praktik (T. Rohman, Penerj., hal. 182). Jakarta: CFMS.

Inu, K. S. (2011). Manajemen Pemerintahan. Dalam k. S. Inu, Manajemen Pemerintahan (hal. 3-5). Bandung: Pustaka Reka Cipta.

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2016). Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016. Dalam A. Cahyaningtyas, D. A.

Prastwi, & E. N. Nurcahyanto, Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016 (hal. 23). Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa.

Maryani, D., & Nainggolan, R. R. (2019). Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Penerberbit Deepublish .

Moleong, l. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Dalam M. Prof.DR. Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (hal. 11 - 175). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang. (2019). Pemerintah Kabupaten Karawang Pro. Jawa Barat Indonesia. Dipetik Agustus 29, 2021, dari Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019 DP3A: https://www.karawangkab.go.id/dokumen/rencana-kerja-renja-tahun-2019-dp3a

Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang. (t.thn.). Pemerintah Kabupaten Karawang Prop. Jawa Barat. Dipetik Agustus 29, 2021, dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A): https://www.karawangkab.go.id/dokumen/dinas-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak-dp3a

Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (2017). Profil Daerah Kabupaten Karawang. Dipetik oktober 06, 2021, dari Website Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat: https://jabarprov.go.id/index.php/pages/id/1055

Puspitawati, H., Herawati, T., & Rahma, A. (2016). TELAAH PENGINTERGRASIAN PERSPEKTIF GENDER DALAM KELUARGA UNTUK MEWUJUDKAN KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER DAN KETAHANAN KELUARGA DI PROVINSI JAWA TIMUR DAN SUMATERA UTARA. 12.

Radhitya, T. V., Nurwati, N., & Irfan, M. (2021). DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik , 115.

Raijaya, I. G., & Sudibia, I. K. (2017). Faktor-faktor Sosial Ekonomi Penyebab Terjadinya Kasus Pelecehan Seksual Pada Anak Di Kota Denpasar. PIRAMIDA Jurnal Kependudukan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia , XIII (1), 10.

Salim. (2009). Konsep Dasar Penelitian Dan Urgensi Pengenalan Masalah. HIKMAH JURNAL ILMIAH BIDANG PENDIDIKAN DAN KEAGAMAAN , 34.

Salusu, J. (1996). Pengambilan Keputusan Stratejik. Dalam J. Salusu, Pengambilan Keputusan Stratejik (hal. 88). Jakarta: Gramedia Widiasarana Indoensia .

Setiawan, K. (2020, April 30). 62.848 Pekerja Jawa Barat Di PHK dan Dirumahkan Akibat Covid-19. Dipetik maret 23, 2021, dari TEMPO.CO: https://tekno.tempo.co/read/1444523/top-3-tekno-berita-hari-ini-virus-corona-n439k-its-gunung-merapi

Sugiyono. (2017). metode penelitian pendidikan . Dalam sugiyono, metode penelitian pendidikan (hal. 196). Bandung: Alfabeta.

Suharto, E. (2014). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Dalam E. Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (hal. 77). Bandung: PT. Refika Aditama.

Sunarti, E. (2001). Studi Ketahanan Keluarga dan Ukurannya. Bogor : Institut Pertanian Bogor.

Varlota, J., Jinia, N. J., & Asaduzzaman, M. (2020). Empowerment Of Civil Society. Empowerment Of Civil Society , 5-6.

Wijaya, D. C., & Rifa'i, M. (2016). Dasar - Dasar Manajemen. Dalam D. C. Wijaya, & M. Rifa'i, Dasar - Dasar Manajemen (hal. 14-17). medan: perdana publishing

Yusuf, A. M. (2014). metode penelitian kualitaif, kuantitatif & penelitian gabungan. jakarta: kencana.